

Peran Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas Teknologi Informasi dalam

Pencapaian SDGs1: Bukti Empiris Pemerintah Daerah di Sulawesi

**Andi Puput Febrianti Syahid, Sri Puspita Wulandari, Nina Yusnita Yamin,
Selmita Paranoan, Betty**

andi.puputfebrianti@yahoo.com, sripuspitawulandaryy@gmail.com,
nyusnita.untad@gmail.com, shelo0709@yahoo.co.id, betty.untad@gmail.com

Universitas Tadulako (UNTAD)

Abstract

This study aims to examine the effect of the maturity level of the Government Internal Control System (SPIP) and information technology capabilities on the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 1, as proxied by poverty levels, in local governments on the island of Sulawesi. The study employs a quantitative approach using secondary data from the period 2018–2024, comprising 308 observations. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) with the aid of WarpPLS version 8.0. The results indicate that SPIP maturity has a significant negative effect on the poverty rate as a proxy for the achievement of SDG 1, with a path coefficient of -0.205 and a p-value < 0.001. These findings indicate that the higher the level of SPIP maturity, the lower the poverty rate among local governments in the Sulawesi region. Meanwhile, information technology capability had no significant effect on the poverty rate, with a path coefficient of 0.058 and a p-value of 0.151. This study provides empirical evidence regarding the importance of strengthening public sector governance through the SPIP in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals. However, the low value of the coefficient of determination suggests that the achievement of SDG 1 is also influenced by other factors outside the research model.

Keywords : Government Internal Control System, Information Technology Capability, SDG 1, Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas teknologi informasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1 yang diproksikan melalui tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di Pulau Sulawesi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2018–2024 sebanyak 308 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan WarpPLS versi 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebagai proksi pencapaian SDGs 1 dengan koefisien jalur sebesar -0,205 dan p-value < 0,001. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

maturitas SPIP, semakin rendah tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi. Sementara itu, kapabilitas teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar 0,058 dan p-value 0,151. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai pentingnya penguatan tata kelola sektor publik melalui SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 1 juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kapabilitas Teknologi Informasi, SDGs 1, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu negara dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sebagai masalah yang bersifat multidimensional, kemiskinan mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan dasar lainnya yang mendukung kesejahteraan hidup (World Bank, 2022). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama yang menargetkan penghapusan kemiskinan secara menyeluruh (Morita et al., 2020; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2023). Dalam konteks Indonesia, pencapaian SDGs 1 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang efektif karena pelaksanaan sebagian besar program pengentasan kemiskinan dilakukan pada tingkat daerah. Kondisi tersebut menjadi semakin penting di kawasan Sulawesi yang memiliki karakteristik sosial ekonomi, tingkat pembangunan, dan kapasitas tata kelola yang beragam antar daerah sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan menunjukkan variasi yang relatif tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pencapaian SDGs 1 melalui kualitas tata kelola dan efektivitas pengelolaan program pembangunan daerah.

Di Indonesia, upaya pengurangan kemiskinan terus menjadi prioritas pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (2025) melaporkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 mencapai 8,57 persen. Meskipun

menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan antar daerah di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Perbedaan kondisi geografis, kapasitas fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan pengelolaan sumber daya daerah menyebabkan capaian pembangunan pada masing-masing daerah menjadi tidak merata (Todaro & Smith, 2021). Kondisi tersebut juga terlihat pada kawasan Sulawesi yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pembangunan yang beragam antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2025) melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 mencapai 13,87 persen, sedangkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2025) mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,77 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan Sulawesi masih bervariasi antar daerah. Heterogenitas kondisi wilayah ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Salah satu instrumen tata kelola yang berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008). Tingkat maturitas SPIP mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern telah diterapkan secara terstruktur dan terintegrasi dalam proses manajemen organisasi (BPKP, 2021). Semakin tinggi tingkat maturitas SPIP, semakin baik kemampuan organisasi dalam mengelola risiko, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program pembangunan dilaksanakan sesuai sasaran yang telah ditetapkan (Rosaline & Syarief, 2021). Penelitian Hidayatul et al. (2025) juga menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas pengawasan dan maturitas SPIP berperan penting dalam memperkuat tata kelola sektor publik dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Selain penguatan sistem pengendalian intern, transformasi digital menuntut peningkatan kapabilitas teknologi informasi dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemerintah daerah, kapabilitas teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan data berbasis digital seperti sistem informasi kemiskinan dan bantuan sosial. Teknologi informasi berperan sebagai sumber daya strategis yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi organisasi, dan pelayanan publik (OECD, 2020). Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan pemerintah daerah mengelola data, merencanakan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan secara lebih terintegrasi dan berbasis bukti (World Bank, 2021). Selain itu, kapabilitas TI yang memadai berkontribusi pada ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan perluasan akses layanan publik, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Madon & Masiero, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas, kualitas pengelolaan keuangan, dan kinerja organisasi sektor publik (Rosaline & Syarief, 2021; Hidayatul et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai kapabilitas teknologi informasi lebih banyak berfokus pada transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (OECD, 2020; World Bank, 2021). Namun, penelitian yang menguji pengaruh tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas teknologi informasi terhadap outcome pembangunan daerah berupa pencapaian SDGs 1 yang diproksikan melalui tingkat kemiskinan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menguji kedua variabel tersebut secara simultan pada konteks pemerintah daerah di kawasan Sulawesi juga masih jarang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas teknologi informasi terhadap pencapaian SDGs 1 yang diproksikan melalui tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur tata

kelola sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intern, transformasi digital pemerintahan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORI

1. Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan antara principal dan agent yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu organisasi. Dalam sektor publik, masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik dan melaksanakan program pembangunan. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan masalah keagenan akibat adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah (Jensen & Meckling, 2019). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Lane (2006), mekanisme pengendalian dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk meminimalkan konflik kepentingan serta meningkatkan akuntabilitas organisasi publik. Dalam penelitian ini, Agency Theory digunakan untuk menjelaskan pentingnya maturitas SPIP sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian tujuan publik.

2. Institutional Theory

Institutional Theory menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh tekanan institusional yang berasal dari lingkungan eksternal. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi cenderung mengadopsi praktik, kebijakan, dan struktur tertentu karena adanya tekanan regulatif, normatif, dan mimetik untuk memperoleh legitimasi. Dalam konteks sektor publik, implementasi SPIP, transformasi digital pemerintahan, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap tuntutan regulasi dan harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Dynamic Capability Theory

Dynamic Capability Theory menjelaskan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang sumber daya yang dimiliki untuk merespons perubahan lingkungan secara efektif (Teece et al., 1997). Kemampuan tersebut memungkinkan organisasi mempertahankan kinerja dan menciptakan nilai dalam lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian (Teece, 2023). Dalam sektor publik, kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat dipandang sebagai bentuk kapabilitas dinamis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan berbasis informasi. Dengan demikian, kapabilitas teknologi informasi menjadi salah satu sumber daya strategis yang berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, termasuk pengurangan tingkat kemiskinan.

4. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Pencapaian SDGs 1

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008). Tingkat maturitas SPIP menunjukkan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan sistem pengendalian intern secara terstruktur dan berkelanjutan (BPKP, 2021). Semakin tinggi tingkat maturitas SPIP, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan (Rosaline & Syarief, 2021).

Dalam perspektif Agency Theory, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi masalah keagenan dan memastikan sumber daya publik digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan program pembangunan yang lebih efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga mendukung pencapaian SDGs 1. Hidayatul et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas pengawasan dan maturitas SPIP berkontribusi terhadap penguatan tata kelola sektor publik. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Tingkat maturitas SPIP berpengaruh terhadap pencapaian SDGs 1 pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi.

b. Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi terhadap Pencapaian SDGs 1

Kapabilitas teknologi informasi merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam sektor publik, teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data (OECD, 2020). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan secara lebih terintegrasi dan efisien (World Bank, 2021).

Berdasarkan Dynamic Capability Theory, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi merupakan kapabilitas strategis yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam merespons berbagai tantangan pembangunan. Penelitian Madon dan Masiero (2025) menunjukkan bahwa konektivitas digital memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Morita et al. (2020) menjelaskan bahwa tata kelola yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat implementasi SDGs di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, kapabilitas teknologi informasi diperkirakan mampu mendukung pencapaian SDGs 1 melalui peningkatan efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kapabilitas teknologi informasi berpengaruh terhadap pencapaian SDGs 1 pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas teknologi informasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1 yang diprosikan melalui tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber resmi pemerintah lainnya.

Penelitian menggunakan data panel periode 2018–2024 dengan unit analisis pemerintah daerah kabupaten dan kota di kawasan Sulawesi. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di kawasan Sulawesi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap selama periode pengamatan, penelitian ini menggunakan 44 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan total 308 observasi yang diperoleh dari kombinasi data kabupaten/kota dan tahun pengamatan (44×7). Observasi penelitian berbentuk kabupaten/kota-tahun (pooled panel data). Pemerintah daerah yang tidak memiliki kelengkapan data pada seluruh variabel penelitian selama periode pengamatan tidak diikutsertakan dalam analisis guna menjaga konsistensi dan validitas data penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencapaian SDGs 1 yang diproksikan melalui tingkat kemiskinan daerah. Tingkat kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data digunakan dalam bentuk persentase tanpa transformasi tambahan. Variabel independen pertama adalah tingkat maturitas SPIP yang diukur menggunakan indeks maturitas SPIP pemerintah daerah yang diterbitkan oleh BPKP dengan skala level 1 sampai level 5. Variabel independen kedua adalah kapabilitas teknologi informasi yang diukur menggunakan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Data SPIP dan SPBE tersedia secara tahunan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Warp Partial Least Squares (WarpPLS). Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel penelitian serta menguji pengaruh tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas teknologi informasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1. WarpPLS merupakan salah satu pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis variance yang dapat digunakan untuk menguji

hubungan struktural antarvariabel penelitian serta mengakomodasi analisis hubungan linear maupun nonlinier (Kock, 2015).

Evaluasi model dilakukan melalui pengujian model struktural dengan melihat nilai Average Path Coefficient (APC), Average Variance Inflation Factor (AVIF), Average Full Collinearity Variance Inflation Factor (AFVIF), Goodness of Fit (GoF), koefisien determinasi (R^2), koefisien jalur (path coefficient), serta tingkat signifikansi (p-value). Menurut Kock (2015), model penelitian dinyatakan layak apabila memenuhi kriteria APC signifikan pada $p\text{-value} < 0,05$, nilai AVIF dan AFVIF ≤ 5 , serta nilai GoF menunjukkan tingkat kelayakan model yang memadai. Hipotesis penelitian diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Evaluasi Model

Sebanyak 308 data observasi dianalisis dengan bantuan WarpPLS versi 8.0. Hasil evaluasi model memperlihatkan nilai APC sebesar 0,131 dengan tingkat signifikansi 0,005, yang menunjukkan bahwa hubungan struktural dalam model layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nilai AVIF sebesar 1,008 dan AFVIF sebesar 1,049 berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sementara itu, nilai GoF sebesar 0,196 mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang memadai dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Model

Indikator	Nilai	Kriteria
APC	0,131 (p = 0,005)	Diterima
ARS	0,038 (p = 0,124)	-
AARS	0,032 (p = 0,143)	-
AVIF	1,008	≤ 5
AFVIF	1,049	≤ 5
GoF	0,196	Small Fit

Sumber: Output WarpPLS 8.0.

a). Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,038 pada variabel SDGs 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan sebesar 3,8 persen terhadap variasi pencapaian SDGs 1. Dengan demikian, masih terdapat 96,2 persen variasi yang kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi

Variabel	Endogen R^2
SDGs 1	0,038

Sumber: Output WarpPLS 8.0.

b). Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur (path coefficient) dan p-value. Hipotesis diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur	P-value	Keputusan
SPIP → SDGs 1	-0,205	<0,001	H1 Diterima
TI → SDGs 1	0,058	0,151	H2 Ditolak

Sumber: Output WarpPLS 8.0.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs 1 dengan koefisien jalur sebesar -0,205 dan p-value < 0,001. Sementara itu, kapabilitas teknologi informasi memiliki koefisien jalur sebesar 0,058 dengan p-value 0,151 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs 1.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa maturitas SPIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian SDGs 1 yang diproksikan melalui tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,205 dan p-value < 0,001. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat maturitas SPIP, maka semakin rendah tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di kawasan Sulawesi. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang semakin baik mampu mendukung pengelolaan sumber daya publik secara lebih efektif, meningkatkan kualitas pengawasan terhadap

penggunaan anggaran, serta mendorong pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks pemerintah daerah di Sulawesi, penguatan SPIP menjadi penting karena wilayah ini memiliki karakteristik pembangunan yang relatif beragam antar daerah. Beberapa kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan pembangunan wilayah, serta tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian SDGs 1. Melalui penerapan SPIP yang lebih matang, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program pembangunan sehingga potensi penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalkan dan program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Temuan ini mendukung Agency Theory yang menjelaskan pentingnya mekanisme pengendalian dalam meminimalkan potensi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal (Jensen & Meckling, 2019). Dalam konteks tersebut, SPIP berperan sebagai instrumen yang membantu meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas penyelenggaraan program pemerintah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Rosaline dan Syarief (2021) serta Hidayatul et al. (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan maturitas SPIP berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pada organisasi sektor publik. Selain itu, temuan ini dapat dipahami melalui perspektif Institutional Theory yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik cenderung mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik untuk memperoleh legitimasi serta memenuhi tuntutan regulasi dan lingkungan kelembagaan yang berlaku (DiMaggio & Powell, 1983).

Hasil pengujian kapabilitas teknologi informasi menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs 1 dengan koefisien jalur sebesar 0,058 dan p-value 0,151. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapabilitas teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs 1 (pengentasan kemiskinan). Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Temuan ini

mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah di Sulawesi, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan pelaporan kinerja, belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian outcome pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan.

Secara empiris, implementasi teknologi informasi di pemerintah daerah umumnya masih didominasi oleh sistem e-planning, e-budgeting, dan pelaporan digital yang berfungsi meningkatkan efisiensi administrasi. Namun demikian, sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan berbasis data kemiskinan yang bersifat real-time dan tersegmentasi wilayah. OECD (2020) menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik di banyak negara berkembang masih berada pada tahap digitalisasi administratif (efficiency-driven), belum mencapai tahap transformasi berbasis nilai publik (public value creation) yang berorientasi pada dampak kebijakan.

Kondisi tersebut juga terlihat di beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana data kemiskinan masih tersebar pada berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik daerah, dengan tingkat integrasi yang terbatas. Akibatnya, pemanfaatan teknologi informasi belum mampu mendukung targeting kebijakan secara optimal, terutama dalam penentuan rumah tangga miskin dan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. BPS (2024) juga menekankan bahwa salah satu tantangan utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah akurasi data dan integrasi sistem data sosial ekonomi.

Selain faktor teknologi, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan. World Bank (2023) menyatakan bahwa penurunan kemiskinan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kualitas kebijakan fiskal, serta efektivitas program perlindungan sosial, bukan semata pada digitalisasi pemerintahan. Dalam konteks Sulawesi Selatan, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil terutama di wilayah perkotaan seperti Makassar, dampak pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata ke wilayah pedesaan dan kepulauan, sehingga ketimpangan wilayah masih menjadi tantangan utama dalam pencapaian SDGs 1.

Lebih lanjut, rendahnya nilai R^2 menunjukkan bahwa variasi pencapaian SDGs 1 tidak dapat dijelaskan secara dominan oleh kapabilitas teknologi informasi maupun maturitas SPIP, melainkan lebih dipengaruhi oleh variabel lain seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas belanja pemerintah, efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2022; Bappenas, 2021). Nilai R^2 yang relatif rendah menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 1 merupakan fenomena kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kapabilitas teknologi informasi dalam konteks pemerintah daerah di Sulawesi lebih tepat diposisikan sebagai enabler administratif yang mendukung efisiensi tata kelola, bukan sebagai determinan langsung dalam penurunan kemiskinan tanpa dukungan kebijakan substantif dan intervensi ekonomi yang inklusif.

Temuan ini memberikan dukungan parsial terhadap Dynamic Capability Theory (Teece, 2007). Meskipun kapabilitas teknologi informasi tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian SDGs 1, teori ini tetap relevan karena menempatkan teknologi informasi sebagai kapabilitas dinamis yang memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, meningkatkan koordinasi, dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Namun, manfaat teknologi informasi baru akan menghasilkan dampak yang optimal apabila didukung oleh kapasitas organisasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Hasil penelitian ini berbeda dengan OECD (2020), World Bank (2021), serta Madon dan Masiero (2025) yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas teknologi informasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1 yang diprosikan melalui tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di Pulau Sulawesi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2018–2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan kapabilitas teknologi informasi

tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengendalian intern memiliki peran yang lebih langsung dan efektif dalam mendukung penurunan kemiskinan dibandingkan pemanfaatan teknologi informasi yang masih dominan pada aspek administratif.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pendekatan governance-based dalam pencapaian SDGs, khususnya bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sementara itu, teknologi informasi diposisikan sebagai enabler yang dampaknya bergantung pada integrasi dengan kapasitas organisasi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Secara praktis, pemerintah daerah di kawasan Sulawesi perlu memperkuat maturitas SPIP melalui penguatan pengendalian risiko, sistem pengawasan, serta akuntabilitas kinerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu diarahkan pada integrasi data lintas sektor agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan wilayah yang terbatas pada pemerintah daerah di Pulau Sulawesi serta variabel penelitian yang belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi pencapaian SDGs 1. Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di luar model yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas belanja publik, serta indikator sosial ekonomi lainnya, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar memperoleh hasil yang lebih general.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pedoman penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. BPKP.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. Badan Pusat Statistik.

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 48(2), 147-160.
- Hidayatul, A., Din, M., Abdullah, M. I., & Karim, F. (2025). APIP capabilities, SPIP maturity, audit opinions, and follow-up on audit recommendations for corruption prevention. *Journal of Economics and Management Scientist*.
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of e-Collaboration (ijec)*, 11(4), 1-10.
- Lane, J. E. (2006). *Public administration & public management: The principal-agent perspective*. Routledge.
- Madon, S., & Masiero, S. (2025). Digital connectivity and the SDGs: Conceptualising the link through an institutional resilience lens. *Telecommunications Policy*, 49(1), 102879.
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, 15(1), 179-202.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital government index 2019 results*. OECD Publishing.
- Rosaline, S. F., & Syarief, A. (2021). Analisis Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 349-358.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Teece, D. J. (2023). Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth. *Strategic Management Review*, 4(1), 1–35.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18(7), 509-533.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development (13th ed.)*. Pearson Education.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2023: Mapping Resilience for the Sustainable Development Goals*. Stylus Publishing, LLC.
- World Bank. (2021). *GovTech Maturity Index 2020: The State of Public Sector Digital Transformation*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank.